

RINGKASAN

Reses atau penjangkauan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD yang disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar didalam membangun daerah hendaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah mendengarkan dan melaksanakan sesuai kehendak rakyat. Terbatasnya komunikasi antara rakyat dengan wakilnya seringkali menjadi hambatan tersendiri yang menyebabkan tidak tersalurkannya aspirasi rakyat itu sendiri. Selain itu, keterbatasan masa reses dan minimnya anggaran menjadi kendala untuk mendapatkan hasil reses yang maksimal. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan reses, demikian juga dengan waktu yang terbatas berpengaruh terhadap hasil dan kualitas reses.

Permasalahan mengenai peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan masa reses itulah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat dan juga untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan masa reses. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan model preskriptif. Bahan hukum yang dikumpulkan akan dikaji secara komprehensif dan dianalisa secara deduktif dengan penyajian yang sistematis. Analisa secara deduktif disesuaikan dengan pengamatan dan kumpulan dokumen yang diperlukan untuk bisa menilai permasalahannya, terutama kepada para koresponden penelitian.

Peran DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kendala yang oleh Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah minimnya waktu, biaya, dan sarana dalam pelaksanaan masa reses. Selain itu, minimnya realisasi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Purbalingga berdasarkan hasil reses/penjangkauan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPD dan APBD. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana usulan konstituen yang tidak (belum) dilaksanakan dalam kebijakan pemerintah daerah, aspirasi rakyat yang tergolong masih minim dan tidak terakomodir.

Kata Kunci: Reses, DPRD Kabupaten Purbalingga, Kendala.

SUMMARY

Recess or selection, the aspirations of the community by DPRD members who are conveyed and fought for to the local government with the aim that in developing regional policies made by local governments that listen and implement according to the people. Limited communication between the people and their representatives is an obstacle that causes the aspirations of the people to be not channeled. In addition, the limited recess period and the minimum budget are recommendations for obtaining maximum research results. The limited budget causes all levels of society to be inaccessible for recess activities, as well as time which affects the results and quality of recess.

The problem regarding the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the aspirations of the community and schools that are under the Purbalingga Regency DPRD in carrying out the research period is the background for the author to conduct this research. This study aims to analyze the role of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the people's aspirations and also to analyze the role of the Purbalingga Regency DPRD in carrying out the recess period. To achieve this goal, this research was conducted using a normative legal research method with a prescriptive model. The collected legal materials will be studied comprehensively and analyzed deductively with a systematic presentation. Deductive analysis, invincible with observations and a collection of documents needed to assess the problem, especially to the research correspondents.

The role of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the aspirations of the community is in carrying out its functions, duties and authorities to carry out its obligations as a member of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing and collecting constituent aspirations through regular visits, administering and following up on community aspirations and complaints, and providing moral accountability and politics to constituents in their constituency. The obstacles faced by members of the Purbalingga Regency DPRD in absorbing the aspirations of the community are the lack of time, cost, and facilities in implementing the recess period. In addition, the lack of realization of the principles of the Purbalingga Regency DPRD's thoughts is based on the results of the recess / collection of community aspirations as outlined in the RKPD and APBD. This can be seen from how to change constituents that are not (not yet) implemented in local government policies, and people's aspirations are still minimal and not accommodated.

Keywords: Recess, DPRD Purbalingga Regency, Constraints.